

Judul : Wakil rakyat deg-degan sampai takut salah ucap
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Wakil Rakyat Deg-degan sampai Takut Salah Ucap

Setelah demonstrasi Agustus, DPR berkomitmen bertransformasi dan memperbaiki kinerja. Evaluasi menyeluruh tengah berjalan, tetapi disebut masih membutuhkan waktu.

Nikolaus Harbowo

Demonstrasi yang dipicu ucapan dan tindakan sejumlah anggota DPR akhir Agustus 2025, meninggalkan dampak nyata di kompleks parlemen. Para anggota Dewan kini jauh lebih berhati-hati berbicara di media, khawatir salah ucap dan kembali memicu kegaduhan.

Seusai rapat komisi, tak jarang mereka langsung bergeser keluar tanpa sepele kata pun. Padahal, para jurnalis sudah bersiap melakukan wawancara cepat (*doorstep*) di sekitar ruang rapat.

"Makanya kalau *doorstep*, kabur semua. Sampai akhirnya wartawan minta, 'Bu (Puan), tolong dong, habis rapat pimpinan atau anggota DPR mau di-*doorstep*?' Enggak ada yang mau. Karena kalau bicara substansi, enggak diberitakan. Tapi, kalau salah *ngomong*, diberitakan. Ya, enggak? Ketawa kan (kalian)?" ujar Ketua DPR Puan Maharani di hadapan awak media dalam acara "Refleksi Akhir Tahun DPR", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

Ia bahkan mengungkapkan, sejumlah anggota Dewan kerap "deg-degan" setiap bertemu wartawan lantaran khawatir pernyataannya "dipencitir". Karena itu, banyak yang lebih memilih menghindari. Sebab, jika sebuah pernyataan bergeser makna dan tersorot luas, dampaknya tidak hanya dirasakan pribadi, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.

Hal serupa dialami Puan. Ia kerap berhitung, menimbang matang-matang pernyataan apa yang layak disampaikan di depan media.

DPR, menurut dia, adalah lembaga politik yang tak selalu bisa diwakili oleh kata-kata. Adakalanya pesan cukup tersampaikan lewat bahasa tubuh, senyum, atau gestur yang tidak

bisa dijelaskan secara verbal.

Hanya saja, ia mengakui, berbicara di depan umum harus disertai empati. Tidak bisa anggota DPR sembarangan memilih kata. Sebab, sekecil apa pun pernyataan itu, rakyat tetap membutuhkan empati.

"Kadang senyum saya itu sudah banyak artinya. Saya juga harus memastikan dulu, mau *ngomong* apa, salah enggak ya, salah enggak ya. Sampai kalian berusaha memahami bagaimana memancing saya, saya berusaha menahan diri saya supaya tidak terpancing. Ya, kan? Ha-ha-ha," kelakar Puan.

Ragi Puan, Ketua DPR adalah *the speaker of the house*. "Bukan saya enggak mau bicara. Tapi, kalau yang saya sampaikan itu salah, yang kena bukan sosok Puan Maharani saja, melainkan juga DPR. Dan, kalau anggota saya salah bicara, meski tidak sengaja, yang dianggap salah itu tetap saya, tuturnya.

DPR, menurut Puan, terus berupaya menjaga dinamika internal agar tetap kondusif. Jika ada perbedaan pendapat, pimpinan DPR mendorong agar itu diselesaikan "di setengah kamar", bukan di ruang publik karena mereka tidak ingin memberikan kesan bahwa DPR hanya diisi keributan.

Saat ini, kata Puan, DPR ingin menunjukkan kepada publik bahwa lembaga itu mampu bekerja untuk rakyat, sesuai mandat pemilih. Karena itu, ia berharap, jika ada satu hingga lima anggota DPR yang kinerjanya mungkin tidak sempurna, publik tidak langsung menyimpulkan seluruh 580 anggota tidak bekerja.

"Banyak *tho* anggota DPR yang benar-benar turun ke dapil (daerah pemilihan) dan bekerja untuk rakyat. Jadi, jangan kesalahan satu-dua atau lima orang itu dibebankan kepada lembaga dan 580 anggota

DPR. Kalau tidak setuju dengan mereka, ya, nanti tahun 2029 jangan pilih lagi. Tapi, jangan salahkan lembaga ini," ucapnya.

Tidak bisa instan

Pascademonstrasi, DPR mulai menggaungkan upaya transformasi lembaga. Perubahan sedikit demi sedikit mulai tampak dari hal-hal paling dasar. Secara fisik, misalnya, gedung yang dulu terkesan kumuh kini lebih bersih. Jika dulu orang bisa merokok di banyak sudut, kini diperketat.

Hal itu mengikuti standar gedung parlemen di sejumlah negara yang melarang merokok. Tak hanya demi kesehatan, tetapi juga aspek keselamatan dan risiko kebakaran.

Kebiasaan masuk tanpa pemeriksaan juga diubah. Seperti halnya di parlemen sejumlah negara lain, Gedung DPR juga menerapkan standar pemeriksaan keamanan yang ketat, termasuk melalui mesin sinar-X.

"DPR itu obyek vital. Jadi, enggak bisa orang asal *nyelonong* masuk," ujar Puan.

Kebijakan moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR juga masih diberlakukan. Namun, kunjungan luar negeri tidak mungkin diadakan sepenuhnya karena hubungan antarlembaga parlemen tetap harus dijalankan meski akan dibatasi.

Puan menambahkan, pimpinan DPR tengah mengevaluasi berbagai tunjangan anggota. Tunjangan yang tidak perlu akan dihapus. Namun, untuk tunjangan perumahan perlu dikaji secara matang karena banyak anggota DPR dari luar daerah yang tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta karena rumah dinas di Kalibata, Jakarta, sudah dikembalikan kepada pemerintah.

"Jadi, banyak hal yang harus kami pikirkan dan diskusikan. Namun, memang perlu waktu,

tidak mungkin semuanya berjalan instan," kata Puan.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, sebagai bagian dari transformasi parlemen, DPR mulai memperketat sistem pelaporan kegiatan *reses*. Aplikasi khusus disiapkan untuk mencatat seluruh aktivitas anggota selama masa *reses*. Dengan demikian, penggunaan dana *reses* diharapkan lebih akuntabel karena setiap anggota wajib melaporkan lokasi, jenis kegiatan, dan mengunggah dokumentasi kegiatannya.

"Langkah ini, menurut dia, menjadi bentuk transparansi kepada publik. Masyarakat pun dapat melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika laporan seorang anggota DPR tidak sesuai kenyataan.

"Sistem sudah ada, sudah disiapkan. Kami tinggal sosialisasi. Tahun 2026 diharapkan sudah berjalan," ujar Cucun.

Bukan hanya di tingkat anggota DPR, upaya transformasi juga dilakukan di belakang layar. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan,

pihaknya tengah mengevaluasi menyeluruh, mencakup aspek persidangan, administrasi, hingga dukungan keahlian.

Ia menyebut seluruh cara kerja di DPR terus dievaluasi secara berkala. Pejabat-pejabat di Sekretariat Jenderal DPR kini juga menjalani penilaian rutin untuk memastikan mereka mampu mengantisipasi berbagai persoalan ke depan dan bergerak sejalan dengan visi transformasi lembaga.

Transformasi juga dilakukan pada laman DPR agar kian terbuka dan mudah diakses publik, terutama terkait draf rancangan undang-undang (RUU).

"Jadi, isu transformasi itu bukan *lip service*, bukan hanya idiom yang itu sebagai strategi komunikasi, tapi transformasi ini kami lakukan secara sungguh-sungguh," ucapnya.

Pertaruhan janji DPR

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, transformasi DPR sangat diharapkan segera terwujud. Publik menunggu pemenuhan tuntutan agar DPR berbenah. Transformasi penting agar DPR kembali efektif dan fungsional.

"Harapan publik adalah DPR bisa menjalankan fungsinya dengan baik, mampu mewakili rakyat, dan tidak elitis. Apalagi kalau sampai bermewah-mewah dan pamer kemewahan di tengah banyaknya masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Menurut Siti, diperlukan pengawasan yang memadai agar DPR tetap berpegang pada janiannya. Tanpa pengawasan publik, sulit berharap komitmen tersebut dijalankan konsisten.

"Dalam situasi *distrust* publik yang tinggi, jika DPR mengingkari janjinya akan muncul kekecewaan serius yang bisa berdampak pada stabilitas dan keamanan," ucapnya.

Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi berpandangan, transformasi DPR yang dibutuhkan seharusnya bersifat menyeluruh.

Bukan hanya menyangkut tindakan atau ucapan, melainkan juga proses legislasi yang justru kerap menimbulkan kemarahan publik.

Menurut dia, pimpinan dan sekretariat DPR mengungkapkan visi DPR dalam membangun parlemen modern, transparan, representatif, serta memanfaatkan teknologi. Namun, pada akhirnya yang diharapkan masyarakat adalah terwakilinya aspirasi publik.

"Undang-undang dan kebijakan harus mewakili kepentingan publik, bukan sekadar memikirkan sirkulasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi elite politik," ujarnya.